

Forum Freedom 40, 03 April 2006

**Tema: DEMOKRASI BERSAMA**

**Nara sumber : Dr.SAIFUL MUJANI**

*"Bagaimana kaum liberal indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada ditengah kita, Freedom Institute bekerjasama dengan KBR 68 H menyajikan Forum Freedom"*

Hamid Basyaib : selamat pagi saudara. anda berjumpa lagi dalam Forum Freedom bersama saya Hamid Basyaib, acara ini disiarkan oleh KBR 68 H dan disponsori oleh Freedom Institute Jakarta dan tamu saya kali ini adalah Dr.Saiful Mujani adalah Direktur riset Freedom Institute dan Direktur Eksekutif Lembaga Survey Indonesia, selamat pagi Ful...?

Saiful Mujani: selamat pagi Hamid...

Hamid Basyaib: kita akan membicarakan lagi mengenai hal yang anda kuasai yaitu tentang kondisi demokrasi di Indonesia, tapi sebelumnya kita sepakati dulu ya, mudah-mudahan anda sepakat bahwa demokrasi dan liberalisme adalah hal yang umum tidak terpisahkan terutama dalam tata pemerintahan dan tata masyarakat, ini bisa dielaborasi lebih jauh. Dua sistem ini dianggap sebagai syarat yang wajib untuk mencapai masyarakat yang maju dan beradab baik dari segi politik, ekonomi dan budaya. Nah, sekarang jika hal itu adalah unsur yang pokok dalam masyarakat. maka kita harus melihat bagaimana demokrasi dan kemasyarakatan di indonesia saat ini, jadi pertanyaan pertama bung Saiful adalah demokrasi di indonesia ini (kata orang) baru dimulai setelah runtuhnya orde baru yaitu ketika pak Harto lengser ke prabon pada tahun 1998, apa betul, menurut anda apakah betul demokrasi baru dimulai setelah runtuhnya orde baru ?

Saiful Mujani: tidak benar Mid, kita lihat bahwa dalam rentan waktu negara kita atau sejarah politik bangsa kita dalam 50 tahun itu kita sudah memulai demokrasi pada tahun 50-an sebenarnya, Cuma tidak lama umurnya karena sebelum berkembang, ia mati muda, karena pada waktu itu terjadi perselisihan di elit politik yang tidak bisa didamaikan. terutama perbedaan ideologis dan ancaman disintegrasi di berbagai daerah, sehingga memberikan tempat yang cukup besar untuk keterlibatan tentara didalam politik di indonesia, itu di satu sisi, dan di sisi yang lain adalah dalam demokrasi kita yang parlementer pada waktu itu, presiden Soekarno perannya menjadi kurang besar, padahal dia boleh disebut sebagai bapak bangsa, pencetus proklamator negara kita. dengan sistem parlementer yang banyak berperan adalah perdana menteri yang waktu itu adalah bukan Soekarno. Oleh karena itu kemudian demokrasi parlementer kita banyak mengalami gangguan terutama itu tadi, adalah perbedaan ideologis antara kelompok islam yang menginginkan indonesia berideologi agama. dalam hal ini islam, sementara kelompok sekuler menentanginya karena tidak ada kekuatan mayoritas diperlemen. maka hasilnya adalah *deadlock*. Pada waktu itulah kemudian presiden Soekarno mengambil alih pemerintahan dan demokrasi parlementer dikubur dalam-dalam oleh presiden Soekarno, pada waktu itu. umurnya belum sampai lima tahun

Hamid Basyaib: maaf anda berbicara soal 50-an ya, kemudian masa itu diidentifikasi sebagai demokrasi liberal dalam arti yang negatif terutama oleh tentara. Kemudian tentara berperan besar, kemudian sampai belasan atau puluhan tahun kemudian demokrasi liberal atau kata

liberal itu menjadi sesuatu yang buruk, konotasinya negatif. Nah kalau saya tadi itu menyebut demokrasi dan liberalisme itu hal yang tidak dapat terpisahkan. Jadi bagaimana ini ?

Saiful Mujani: betul, bahwa didalam masyarakat kita ada pandangan yang pegoratif, yang negatif terhadap kata liberal itu pertama-tama harus kita telusuri akarnya tadi. Seperti yang telah anda sebutkan adalah dari elit politik yang tidak demokratis, orde baru berkuasa sangat lama, kebetulan kekuasaan orde baru tersebut tidak demokratis dan untuk mendapatkan legitimasi bahwa kekuasaan orde baru itu benar dan untuk memberikan respon terhadap kelompok-kelompok di masyarakat yang menginginkan demokrasi maka merujuklah pada demokrasi pada tahun 50-an yang gagal tersebut. disisi lain, ketika anda menyebut demokrasi itu tidak bisa dipisahkan dari liberalisme atau demokrasi itu sendiri adalah liberal itu benar, bahwa kemudian demokrasi kita itu belum liberal itu artinya masih didalam proses yang masih jauh dari selesai dalam perjalanan demokrasi tersebut. Kalau kita mau sederhanakan sebenarnya didalam demokrasi itu ada dua dimensi. *Pertama*, dimensi kontestasi politik, persaingan politik, itu lebih dikuasai oleh... atau diterjemahkan oleh partisipasi politik. Contohnya didalam pemilihan umum. disitu warga negara dibebaskan untuk berebut jabatan-jabatan publik dan ada kebebasan warga negara mendukung kelompok atau orang tertentu agar menduduki jabatan publik tersebut. Nah kalau ada kebebasan bidang itu berarti syarat demokrasi sudah dipenuhi sebelah. tapi di sisi yang lain bahwa kebebasan tersebut, kebebasan politik atau dimensi partisipatif didalam demokrasi itu tidak bisa berkembang secara optimal apabila tidak disertai atau dibangun dari akar yang kuat dari apa yang kita sebut sebagai dimensi lain dari demokrasi adalah *civil liberty* kebebasan masyarakat itu sendiri. oleh karena itu misalnya kebebasan untuk kelompok minoritas punya pandangan yang berbeda dari mayoritas itu adalah suatu hal yang mestinya didalam demokrasi itu tidak menjadi persoalan. Hal-hal yang menyangkut pandangan individual atau satu kelompok tertentu yang tidak merugikan kelompok yang lain itu mestinya dilindungi oleh konstitusi kita. dan sebenarnya konstitusi kita melindungi itu. tetapi dalam prakteknya itu tidak gampang istilah demokrasi kita itu hanyalah demokrasi pemilihan umum tapi pengakuan terhadap hak-hak minoritas, hak-hak warga negara yang berbeda dari warga negara yang lain itu belum berjalan, yang saya lihat.

Hamid Basyaib : itu yang terjadi, bisa tidak kalau kita katakan yang anda ceritakan itu. Itulah persisnya yang terjadi selama orde baru. Artinya orde baru juga punya pemilihan umum yang rutin, ada pemilihan macam-macam, ada institusi-institusi, demokratis juga ada selain yang tidak demokratis juga ada, seperti ada yang ekstra legal seperti dibidang keamanan misalnya.

Saiful Mujani: tidak benar Mid sebenarnya, kalau yang saya maksud dengan kebebasan politik atau dimensi partisipatif dari demokrasi itu ada pada zaman orde baru dari demokrasi. itupun tidak ada di zaman orde baru, walaupun kita ada pemilihan umum pada zaman orde baru, kita tahu tidak boleh orang mendirikan partai sembarangan, dia misalnya presiden Soeharto membatasi partai politik hanya pada tiga misalnya. Yang dianggap partai yang berbau islam misalnya dikelompokkan pada PPP oleh presiden Soeharto sendiri, yang berbau nasionalis dan non-muslim dikelompokkan dalam PDI perjuangan misalnya, dan yang tidak jelas identitasnya itu masuk dalam Golkar. Dan itu dibuat oleh presiden Soeharto bukan aspirasi masyarakat.

Hamid Basyaib: wah, ini menjadi semakin menarik, jadi kalau sekarang kita mulai dengan pernyataan bahwa demokrasi di Indonesia baru dimulai setelah runtuhnya orde baru dan itu tidak benar. Artinya pada tahun 50-an kita punya pengalaman demokratis luar biasa dan kemudian terpotong secara tragis katakan. Lalu dilanjutkan oleh orde baru yang 30 tahun

lebih. Nah sekarang, setelah orde baru runtuh menurut anda bagaimana kondisi demokrasi di Indonesia. Hari-hari ini.

Saiful Mujani: itu yang saya katakan tadi Mid, jadi kita sudah mempunyai demokrasi tapi baru separuh. itu, sekarang ini yaitu demokrasi dalam pengertian pemilu, demokrasi lebih didefinisikan sebagai satu dimensi saja dari demokrasi yaitu partisipasi politik. Kebebasan di partisipasi politik. Sementara saya melihat aspek *civil liberty* nya terancam, belum berkembang, misalnya yang saya maksud dengan *civil liberty* itu adalah misalnya negara itu tidak punya wewenang untuk mengurus apakah orang itu beragama atau tidak beragama, itu urusan warga negara dan Allah S.W.T kalau dalam islam atau dalam agama lain dengan Tuhannya. Katakan begitu. Dalam hal ini menurut saya. tapi ada *statement* dari SBY yang lalu tapi itu sangat penting, tapi itu tidak didiskusikan secara umum. bahwa negara tidak ikut campur untuk menentukan agama warga negara. itu pernyataan yang sangat maju menurut saya. Tapi kurang mendapat respon dari publik.

Hamid Basyaib: kenapa itu kira-kira, orang tidak sadar tentang maknanya ya?

Saiful Mujani: dibalik itu, itu arahnya jelas, artinya ada tuntutan dari masyarakat komunitas cina kita di indonesia agar konghucu diterima sebagai agama yang sah, yang resmi oleh negara. respon presiden adalah bahwa silahkan beragama tentu saja, dan jangan berharap pada pemerintah untuk melegitimasi keberagamaan anda dan itu tidak ada hubungannya. Itu kira-kira begitu.

Hamid Basyaib: dan itu berlaku terhadap semua agama.

Saiful Mujani: mestinya itu kalau direspon dengan baik dalam perspektif demokrasi yang modern itu agama-agama yang lain juga itu tidak membutuhkan pengakuan negara. yang dibutuhkan adalah pengakuan dari masing-masing jamaahnya dan keyakinan dia. bahwa Allah menerima agama dia. Itu saja, bukan negara. nah, aspek itu di kita belum berjalan. Kita melihat bagaimana warga negara yang lahir disini itu bisa melihat dan diapun tidak minta lahir di indonesia misalnya. Tapi kebetulan lahir di indonesia. Tapi kemudian punya pandangan keagamaan yang berbeda. Diusir, bahkan diancam. Nah hal itu menurut saya, hal semacam itu mencerminkan demokrasi kita di aspek *civil liberty* nyabelum berkembang

Hamid Basyaib: baik Ful, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, anda masih bersama saya Hamid Basyaib dalam Forum Freedom dan kita akan kembali setelah yang satu ini.

=====IKLAN=====

Hamid Basyaib: selamat pagi saudara, anda masih bersama saya Hamid Basyaib dalam Forum Freedom, dan tamu saya masih yang tadi juga yaitu Dr. Saiful Mujani, direktur riset Freedom Institute dan direktur eksekutif Lembaga Survey Indonesia. Tadi Saiful sudah bicara banyak tentang bahwa demokrasi di Indonesia sekarang ini masih berat sebelah. Ada partisipasi dan sebagainya oke, tapi disisi yang lain ada ancaman yang sangat serius terhadap *civil liberty's* atau kebebasan masyarakat yang merupakan landasan yang sangat penting didalam satu masyarakat yang demokratis atau dalam satu sistem demokrasi. Nah Ful, anda tadi menyinggung satu hal yang sangat relevan paling tidak dengan buku Fareed Zakaria. Paling tidak anda sudah membacanya. Buku yang banyak dibicarakan.

Saiful Mujani: dan artikel dia pada NewsWeek diulang kembali

Hamid Basyaib : argumentasi illiberal demokrasi

Saiful Mujani: illiberal demokrasi..

Hamid Basyaib: illiberal demokrasi, ini persis seperti yang baru saja anda katakan tetapi bedanya Fareed Zakaria dan anda adalah bahwa ia bilang bahwa demokrasi itu memang bisa mengancam nilai-nilai yang dianggap merupakan fondasi masyarakat beradab. Yaitu nilai-nilai *liberal constitutional* seperti kebebasan, toleransi, pluralisme dan hak asasi manusia. Karena itu Fareed zakaria. Ini kolumnis terkenal di NewsWeek dan pemikir politik muda yang termasuk menonjol di Amerika sekarang. dia menyebut fenomena di banyak negara berkembang termasuk kita adalah demokrasi yang illiberal atau demokrasi yang tidak liberal, bagaimana ?

Saiful Mujani: saya kira penilaian seperti itu ada benarnya, seperti yang saya katakan tadi, gejalanya jelas bahwa demokrasi yang berkembang di negara-negara baru, di negara-negara berkembang tersebut termasuk di negara kita adalah pertama-tama demokrasi dimulai dengan pemilu, kedua kebebasan untuk memperebutkan jabatan-jabatan publik, itu dimulai dari situ. Sementara aspek yang saya sebut tadi, yaitu aspek liberalnya atau liberalisme itu kurang mendapat tempat dan kurang berkembang di negara tersebut. Seperti saya contohkan tadi bahwa disatu sisi kita mengakui bahwa negara kita negara demokrasi, tapi disisi yang lain kita bisa mengusir orang yang nenek moyangnya ada disini. Hanya gara-gara agamanya berbeda. Misalnya pada kasus Ahmadiyah. Saya bukan orang Ahmadiyah dan saya tidak setuju dengan agama itu. tapi saya tidak punya hak untuk mengusir orang ahmadiyah tersebut dan tidak punya hak untuk menista orang ahmadiyah tersebut sehingga tidak boleh tinggal di negeri Indonesia misalnya.

Hamid Basyaib: sampai mereka minta suaka misalnya

Saiful Mujani: sampai mereka minta suaka misalnya, nah itu menurut saya sangat menyedihkan, ketika kita berada didalam alam demokrasi. Nah, Fareed zakaria menyebut itu illiberal demokrasi, persis. Begitu gejala demokrasi yang ada di negara kita. demokrasi yang tidak liberal. Kita punya pemilu. Tetapi ada orang yang mempunyai faham keagamaan berbeda tidak boleh hidup di negeri ini.

Hamid Basyaib: nah, ini menarik sekali ya Ful ya, karena saya kira cukup banyak orang yang tergoda untuk melihat cara begini. Ya itukan kasus-kasus kecil dan kelompoknya juga kecil saja. Ya kira-kira...okelah itu salah. tapi ada bidang besarnya yang itu sudah baik. Kira-kia begitu tidak, bisa tidak argumen yang seperti ini dipertanggungjawabkan dari sudut demokrasi ?

Saiful Mujani: tidak bisa, karena saya melihat begini. Kalau kita meletakkan salah satu prasyarat demokrasi yang secara optimal. Itu memang seharusnya begitu. Kita tidak bisa mentoleransi tindakan-tindakan warga negara yang illiberal semacam itu.

Hamid Basyaib: bukan soal jumlahnya.

Saiful Mujani: bukan soal jumlahnya, justru *civil liberty* itu intinya disitu itu. salah satunya seperti itu misalnya adalah. melindungi, menghargai kelompok minoritas bahkan individu. Seperti ahmadiyah atau seperti Lia Eden misalnya. Saya tidak setuju, dan saya tidak suka dengan keyakinan seperti itu. Tapi sebagai warga negara tidak boleh kita mengusirnya dan seterusnya. Dan oleh karena itu melihat dari sisi itu kita belum berkembang didalam

demokrasi di aspek tadi. *Civil liberty* nya tersebut. Oleh karena itu seperti yang disebutkan oleh Fareed Zakaria bahwa ada illiberal demokrasi itu mencerminkan kenyataan yang berkembang dimasyarakat kita sendiri.

Hamid Basyaib: nah, nanti kita akan singgung soal itu. Saya akan menyinggung aspek lainnya. tapi berhubung anda berbicara itu. Mungkin saya lanjutkan saja bahwa baru-baru ini ada dua pejabat negara yang sangat sangat penting. Yang menurut Dalam pandangan saya, secara netral menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan konstitusi dan berlawanan dengan prinsip prinsip demokrasi. Masih menyangkut ahmadiyah. Anda menyebut ahmadiyah tadi. Ketua MPR, bapak Hidayat Nur Wahid bilang di Pekanbaru atau dimana. Di Sumatera bilang. Ya.. mereka itu kalau mau gampang ya kembali saja Ke *mainstream* islam, artinya pandangan ahmadiyah dianggap salah dan tinggal kembali saja, kemudian beberapa hari kemudian menteri agama bilang juga ahmadiyah itu tidak usah repot-repot. Nyatakan saja diri sebagai non-islam selesai kan ? nah pertanyaan saya adalah orang ahmadiyahnya masih menganggap dirinya islam jadi persis seperti yang anda bilang tadi. Ini soal pemahaman, artinya kalau mau di cari-cari perbedaan saya kira Muhammadiyah dan NU juga banyak perbedaannya. Nah ini bagaimana Ful, ada dua pejabat negara yang justru mendukung..

Saiful Mujani: itu sebenarnya, bahwa kalau kita konsisten dengan demokrasi dan konstitusi kita sendiri sebenarnya. Bahwa melindungi hak-hak asasi negara termasuk minoritas tersebut. itu pernyataan pejabat tersebut merupakan pernyataan yang tidak konstitusional kalau menurut saya. Karena orang ahmadiyah seperti yang saya katakan tadi, dasarnya adalah bahwa persoalan agama adalah persoalan bagaimana orang memahami orang yang meyakini sesuatu yang dianggap sangat penting oleh individu atau komunitas tertentu. Nah orang ahmadiyah merasa diri mereka islam dan itu cara berislam dia.

Hamid Basyaib: qur'annya sama, dan semuanya...

Saiful Mujani; apapun, penafsirannya bisa berbeda dan seterusnya. Intinya adalah bahwa apakah dia itu salah atau tidak salah itu urusan dia dengan Tuhannya. bukan urusan orang ahmadiyah dengan departemen agama. Bukan urusan antara orang ahmadiyah dengan ketua MPR tersebut. Tidak ada urusannya dengan itu. Tapi saya juga tahu bahwa ini juga tidak bisa digeneralisasi sebenarnya. itu tidak bisa dilepaskan dari preferensi dari pejabat tersebut. Hidayat nur wahid kita tahu posisi politik, keagamaan dan sebagainya seperti apa. dan demikian juga bahwa menteri agama dan departemen agama seperti apa. Nah oleh karena itu menurut saya itu adalah satu kontradiksi dan oleh karena itu kita harus memberikan pencerahan kepada masyarakat secara umum bahwa pandangan yang semacam itu sebenarnya diluar konstitusi kita dan itu adalah sudah menyimpang dari koridor demokrasi. didalam konstitusi kita kan tidak ada definisi bahwa seseorang islam itu harus Ini dan harus itu. kan tidak ada

Hamid Basyaib: mengapa dia yang harus menentukan.

Saiful Mujani: nah tidak ada, oleh karenanya cukup liberal kerangka kelembagaan dan undang-undang kita sehingga sangat inklusif dan bisa menampung siapa saja yang berada disitu. Nah oleh karena itu menurut saya kita harus kembali kepada konstitusi, dan sebenarnya orang ahmadiyah walaupun saya tidak setuju. itu bisa menggunakan dasar itu untuk melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara secara hukum dan menurut saya, nah, ini masalahnya lagi-lagi masalah budaya demokrasi kita. persoalan hukum ini maksud saya adalah hak hidup warga negara itu yang melindungi adalah konstitusi pelaksanaannya

adalah di lembaga-lembaga hukum maka harus diselesaikan disana. tetapi sebelum itu kan terjadi penyerangan terhadap minoritas yang tidak sejalan dengan keyakinan kita sendiri. nah oleh karena itu kemudian menjadi permasalahan yang tidak sederhana dalam masyarakat kita. jadi menurut saya adalah ahmadiyah sendiri punya hak untuk menyelesaikan masalahnya secara hukum. Menurut saya tinggal mengajukannya ke pihak mahkamah agung atau ke mahkamah konstitusi atau bagaimana posisi mereka didalam republik ini

Hamid Basyaib: kalau perlu sampai ke mahkamah internasional,

Saiful Mujani: saya kira ia, mereka punya hak untuk itu

Hamid Basyaib: kita kembali sedikit Ful, ini mari kita tarik lagi ke yang umum ya, anda tadi sudah membicarakan demokrasi illiberal dan seterusnya. Nah sekarang ini banyak orang yang menganggap ironis bahwa ketika kran demokrasi telah dibuka. Justru ancaman terhadap *civil liberty* itu meningkat. Saya tidak pegang datanya tetapi secara sepintas kita dapat melihat, kita bisa bilang bahwa pada masa orde baru yang tidak demokratis itu dibanding 6 atau 7 tahun setelah reformasi seperti sekarang ini. tingkat pelanggaran seperti sekarang ini mungkin lebih banyak pada periode yang singkat ini, jadi ironisnya disini ketika kran demokrasi dibuka, ancaman terhadap *civil liberty* itu muncul dan ketika demokrasi tertutup, *civil liberty* relatif jauh lebih terjamin.

Saiful Mujani: saya kira pengamatan anda tersebut ada benarnya, karena apa, karena demokrasi itu pada dasarnya sangat bertumpu pada sikap dan perilaku masyarakat sendiri. oleh karena itu, jika pada masyarakat sendiri punya sikap atau pandangan atau nilai-nilai tertentu yang tidak atau belum berjalan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. maka kemudian yang terjadi adalah seperti yang anda sebutkan tadi pada waktu yang relatif singkat pelanggaran terhadap satu dimensi demokrasi itu banyak terjadi dibandingkan Pada zaman orde baru. Pada zaman orde baru *civil liberty* itu tidak muncul, persoalan *civil liberty* relatif lebih sedikit, katakan begitu. itu karena apa, itu karena peran pemerintah sebaliknya. Didalam apa, apa namanya sistem yang tidak demokratis dengan cara represif. jadi kalau ada pandangan yang berbeda dari kelompok yang lain, dan kemudian kelompok yang beda tersebut diancam. Nah, negara karena pada waktu itu negara bisa dikendalikan dari pusat. karena kekuatan bersenjata yang utama maka hal itu bisa dicegah. Sementara sekarang semuanya itu lebih banyak bertumpu pada masyarakat itu sendiri. pemerintah bahkan hati-hati, sangat hati-hati dan takut tidak populer. Populer artinya merujuk pada aspirasi mayoritas. Disitu berbahayanya bahwa ancaman tirani mayoritas itu, di masyarakat kita itu betul-betul bisa terjadi karena itu tadi, karena sikap dan nilai-nilai yang ada di masyarakat belum mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Hamid Basyaib: baik saiful, ini sangat menarik, mudah-mudahan minggu depan kita bisa dilanjutkan tapi untuk kali ini waktunya sudah habis. dan saudara begitulah akhir diskusi kita pada pagi ini di Forum Freedom bersama Dr. Saiful Mujani, direktur riset Freedom Institute dan direktur eksekutif Lembaga Survey Indonesia dan saya Hamid Basyaib mohon diri, tapi sebelumnya anda bisa mengirim SMS ke 021-70497497 dan kita berjumpa lagi minggu depan Wassalam.

---

\* Ditranskrip oleh Acun